
Memmingkai Deforestasi: Analisis Model Entman dalam Kolaborasi Enam Media di Kalimantan Barat

Retno Manuhoro Setyowati

Universitas Semarang

E-mail: retnomanuhoro@usm.ac.id

Article History:

Received: 20 Juli 2024

Revised: 07 Agustus 2024

Accepted: 09 Agustus 2024

Keywords: Framing, Entman, Deforestasi, Kolaborasi Media, PT Mayawana

Abstract: Ironisme kondisi hutan tropis saat ini terjadi di Kalimantan Barat, padahal seharusnya provinsi ini menjadi aktor utama pelestarian hutan. Riset yang pernah dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat menyatakan bahwa salah satu perusahaan besar yang menjadi pelaku dari aksi deforestasi ini adalah PT Mayawana Persada. Kenyataan ini mendorong Depati Project dan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Hidup Indonesia menginisiasi liputan kolaborasi enam media dengan tema yang sama, yakni deforestasi dengan pelakunya adalah PT Mayawana. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai pembingkai isu deforestasi yang dilakukan oleh PT Mayawana dalam liputan kolaborasi enam media massa tersebut, serta mengidentifikasi elemen-elemen framingnya. Metode penelitian ini menggunakan analisis framing Entman dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing media memiliki penonjolan dan seleksi isu yang berbeda dalam mengisahkan deforestasi oleh PT Mayawana. Jaring.id, CNN TV, dan Ekuatorial lebih menekankan pada dampak sosial dan ekonomi terhadap komunitas adat dan masyarakat lokal, sedangkan Pontianak Post dan Mongabay lebih fokus pada dampak lingkungan dan ekosistem. Selain menyoroti nasib orang utan dan satwa liar lainnya, Betahita.id juga menyoroti aspek hukum dan tanggung jawab perusahaan serta pemerintah dalam menjaga keberlanjutan hutan. Perbedaan fokus framing ini dipengaruhi oleh kebijakan editorial, audiens target, dan afiliasi dukungan. Temuan ini menunjukkan adanya keberpihakan media dalam melaporkan isu deforestasi, dan cenderung berpihak pada perlindungan lingkungan dan hak-hak komunitas lokal.

PENDAHULUAN

Kejayaan Indonesia sebagai negara yang terkenal sebagai paru-paru dunia dan predikat negara yang tercatat masih mempunyai luasan hutan, agaknya perlu dipertanyakan kembali. Kenyataan berbicara, hutan tropis tidak lagi dipenuhi dengan pepohonan berkayu besar dan dihuni dengan keanekaragaman hayati. Deforestasi masih saja terjadi, dan menunjukkan adanya peningkatan pembabatan hutan untuk kepentingan komoditas yang dinilai “lebih menguntungkan”. Sempat tercatat mengalami penurunan angka deforestasi, namun pada faktanya kini tantangan membentang luas untuk mengatasi persoalan kepunahan habitat hewan, tumbuhan hutan tropis yang kaya manfaat, krisis bagi masyarakat adat, dan kelestarian ekosistemnya. Tren peningkatan deforestasi berbasis komoditas ini terjadi di tengah laporan yang menyatakan bahwa dalam satu dekade terakhir ini sektor pulp dan sawit mengalami penurunan (Wijaya, dkk., 2022). Ironisme kondisi hutan tropis saat ini terjadi di Kalimantan Barat. Sebagai provinsi yang seharusnya masih memiliki kekayaan bernama hutan tropis, kini mengalami nasib yang memprihatinkan. Padahal, berdasarkan keterangan dari laman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi ini berpotensi besar terlibat menyelesaikan program Perhutanan Sosial yang dilandaskan dari SK Menteri Kehutanan Nomor 733 Tahun 2014. Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 8.4 Juta Hektar atau sekitar 58% dari total luas wilayah Kalimantan Barat (kalbarprov.go.id, 2024).

Munculnya Surat Keputusan dan serangkaian kegiatan untuk pelestarian hutan, nyatanya bergerak tidak linier di provinsi ini. Fenomena pembabatan hutan terus terjadi dan masif. Salah satu perusahaan besar yang diduga menjadi pelaku dari aksi deforestasi ini adalah PT Mayawana Persada, sebuah perusahaan yang mengelola konsesi kayu pulp di Provinsi Kalimantan Barat. Terhitung mulai tahun 2021, perusahaan ini telah membabat hutan seluas lebih dari 33.000 hektare, menyumbang lebih dari seperempat total deforestasi di ratusan konsesi perkebunan kayu pulp dan sawit di seluruh Indonesia (Greenpeace Indonesia, 2023). Akibatnya, terbuka lebar ancaman konflik sosial dengan masyarakat adat Dayak, kepunahan spesies yang sebenarnya dilindungi, dan ketidakseimbangan ekosistem menjadi semakin jelas. Keberlangsungan hidup orang utan, rangkong gading, beruang madu, dan owa jenggot putih sebagai daftar satwa yang dilindungi kini juga dalam kondisi memprihatinkan (WWF Indonesia, 2024).

Sebenarnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan surat nomor S.360/PHL/PUPH/HPL.1.0/B/3/2024 tertanggal 28 Maret 2024, yang meminta PT Mayawana Persada untuk menghentikan semua aktivitas pembukaan hutan pada areal bekas tebangan atau Logged Over Area (LOA). Dalam surat yang ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal PHL, bernama Agus Justianto, KLHK menuntut PT Mayawana Persada untuk menghentikan seluruh aktivitas penebangan dan fokus pada kegiatan pemulihan lingkungan termasuk kegiatan penanaman pada lahan kosong, semak belukar, dan tanah terbuka. Meski demikian, surat itu nyatanya tak cukup membuat PT Mayawana Persada menghentikan aktivitas penebangannya. Aktivitas penebangan hutan yang membuat para satwa dan masyarakat adatnya menderita, juga sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Hal ini disebabkan karena lahan gambut memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding lahan mineral. Apabila terjadi kerusakan pada ekosistem gambut, maka akan mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya.

Hasil penelusuran citra satelit yang dilakukan koalisi masyarakat sipil pada periode 1-24 April 2024, menemukan pembukaan lahan gambut seluas 434,33 hektare yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin PBPH-HT (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Dalam Hutan Tanaman) itu. Berdasarkan hasil analisis Pantau Gambut, ditemukan setidaknya 83.060 hektare atau sekitar 50 persen ekosistem lahan gambut berada di dalam konsesi Mayawana Persada. Sekitar

26 persen merupakan gambut sangat dalam, 23 persen gambut dalam, 36 persen gambut sedang, dan 14 persen gambut dangkal. dilihat dari sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, ekosistem gambut menjadi yang paling rentan. Bahkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh lembaganya itu, setidaknya dalam setahun terakhir ditemukan hot spot kebakaran hutan dan lahan berada di Mayawana Persada.

Inilah yang dinamakan sebagai potensi besar dan tidak terelakkan apabila ekosistem gambut rusak, maka sulit untuk dipulihkan, dan hal itu sudah terjadi saat ini. Sehingga menjadi konsekuensi logis yang akan dihadapi adalah risiko kebakaran hutan saat musim kering panjang, dan banjir pada saat musim penghujan.

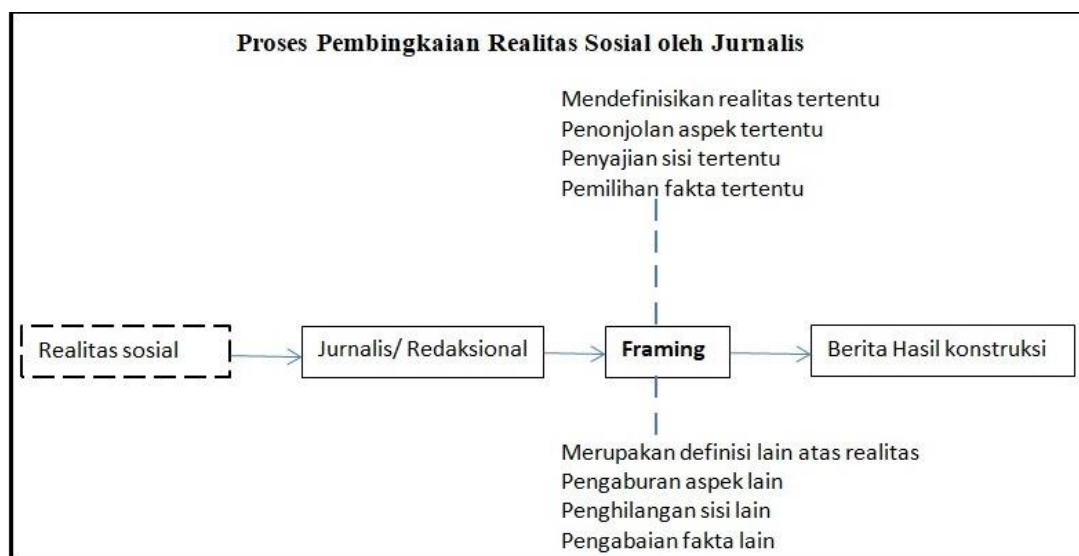
Adanya kenyataan ini, mendorong para jurnalis bergerak menjalankan fungsinya sebagai pilar ke empat demokrasi, yakni dengan peliputan langsung di hutan Kalimantan Barat yang terkena deforestasi oleh PT Mayawana. Fungsi pers sebagai watch dog dijalankan oleh para jurnalis yang bekerja demi menyajikan data dan fakta di lapangan. Pers bertugas untuk mendokumentasikan kejadian, menginvestigasi secara mendalam, dan melaporkan hasil temuan dengan akurat dan berimbang. Dengan demikian, pers dapat mendorong akuntabilitas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mempengaruhi kebijakan publik untuk perlindungan lingkungan yang lebih baik. Tanggung jawab media massa dalam konteks ini mencakup penyajian berita yang berlandaskan fakta, serta menjaga independensi dari tekanan politik atau ekonomi untuk memastikan objektivitas dan kejujuran dalam pelaporan. Independensi jurnalis menjadi krusial agar informasi yang disampaikan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, sehingga masyarakat mendapatkan berita yang benar dan dapat dipercaya (Hanitzsch, T., 2011).

Fungsi pers Indonesia dalam pemberitaan tentang kejahatan lingkungan sangat vital dalam membangun kesadaran publik dan mendorong perubahan kebijakan. Media massa berperan dalam membentuk opini publik dengan menyediakan platform untuk diskusi dan advokasi isu-isu lingkungan, sehingga masyarakat lebih sadar dan termotivasi untuk terlibat dalam upaya pelestarian (Pickard, V, 2022).

Para jurnalis yang didukung penuh oleh Depati Project dan The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) ini memberikan karya jurnalistiknya dalam bentuk indepth reporting dan liputan investigasi untuk menyajikan realitas yang ada dalam kasus hutan Kalimantan dan PT Mayawana. dan saling berkolaborasi antar media. Tercatat ada enam media yang berkolaborasi, yakni Jaring.id, Ekuatorial.com, Betahita.id, Mongabay.id, CNN TV, dan Pontianak Post. Kegiatan kolaborasi liputan dilakukan sebagai strategi alternatif untuk menguatkan peran jurnalis dan media massa sebagai pengawas praktik-praktik kejahatan lingkungan. Karena bagaimana pun, media massa menjadi pihak yang sangat penting di Indonesia, dan sudah seharusnya menyoroti praktik deforestasi dengan lebih serius. Fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi Indonesia dijalankan dalam liputan kolaborasi ini. Dalam liputan kolaborasi itulah nantinya akan nampak sejauh mana media massa mampu mempunyai independensi dalam menyuarakan data dan fakta, dan untuk mengetahui apakah media massa yang tergabung dalam liputan kolaborasi tersebut mempunyai keberpihakan pada pihak-pihak tertentu atau tidak. (Vos, T. P, 2021) Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis dengan menggunakan analisis framing Entman. Analisis framing Entman menawarkan pendekatan untuk menganalisis bagaimana media membingkai isu-isu tertentu. Dalam konteks penebangan hutan di Kalimantan Barat, analisis framing dapat membantu mengungkap bagaimana media mendefinisikan masalah, menginterpretasikan penyebabnya, membuat penilaian moral, dan menyarankan penanganannya.

LANDASAN TEORI

Dalam konteks media, framing mengacu pada cara media membingkai sebuah isu atau peristiwa. Salah satu definisi framing yang paling berpengaruh dalam studi komunikasi massa dikemukakan oleh Entman, dimana ia mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa tersebut lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Menurut Entman, framing secara esensial meliputi penyeleksian dan penonjolan. Membuat frame adalah menyeleksi beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan (Rulli Nasrullah, 2020).



Gambar 1. Alur Proses Pembingkai Realitas oleh Jurnalis

Konsep framing dalam komunikasi massa terus mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam menghadapi lanskap media digital yang dinamis. Chong dan Druckman (Chong, D., & Druckman, J. N., 2021) dalam "Annual Review of Political Science" menekankan pentingnya memahami framing sebagai proses dinamis yang melibatkan kompetisi frame dan evolusi frame seiring waktu, khususnya dalam konteks media sosial dan lingkungan informasi yang terfragmentasi. Sejalan dengan ini, didalam sebuah praktek jurnalisme juga mengeksplorasi bagaimana framing beradaptasi dengan era digital, menunjukkan bahwa efek framing tidak hanya dipengaruhi oleh konten media, tetapi juga oleh karakteristik platform digital dan pola konsumsi informasi pengguna (Lecheler dkk., 2020).

Dalam konteks pembentukan opini media, framing memainkan peran krusial yang semakin kompleks di era informasi yang berlimpah. Sementara itu Matthes dalam "Journal of Communication" mendemonstrasikan melalui studi empirisnya bagaimana frame yang berbeda dapat menghasilkan interpretasi dan evaluasi yang berbeda terhadap isu yang sama, menegaskan peran sentral framing dalam membentuk opini public (Matthes, J., 2021). Pengaruh framing dalam pembentukan opini media juga semakin terkait erat dengan konsep agenda-setting dan priming di era digital. Guo dan McCombs dalam "Journalism & Mass Communication Quarterly" mengeksplorasi hubungan antara ketiga konsep ini, menunjukkan bagaimana framing dapat memperkuat atau melemahkan efek agenda-setting dalam konteks media yang terfragmentasi (Guo, L., & McCombs, M, 2020). Dalam era post truth, framing bisa digunakan untuk alat polarisasi opini juga penguatan eco chambers informasi. Posisinya di media sosial juga dapat

mempengaruhi pembentukan opini publik, dengan fokus khusus pada peran algoritma dan filter bubble dalam memperkuat atau melemahkan efek framing tertentu (Walter, N dkk., 2024).

Dalam bukunya "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", Eriyanto menekankan relevansi berkelanjutan dari model Entman dalam menganalisis wacana media di era digital, khususnya dalam konteks isu-isu kontroversial (Eriyanto, 2020). Dalam bukunya ini, ia menyatakan bahwa analisis framing menggunakan model Entman telah menjadi alat yang signifikan dalam studi media di Indonesia, khususnya dalam mengkaji isu-isu sosial dan politik. Framing juga sangat relevan dalam konteks media di Indonesia, karena empat elemen framing Entman (definisi masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan) dapat digunakan untuk mengungkap konstruksi realitas oleh media.

Perkembangan terbaru dalam aplikasi model Entman di Indonesia juga mencakup integrasi dengan pendekatan analisis wacana kritis dan studi resepsi audiens. Penelitian Nugroho di tahun 2023 yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Komunikasi mengeksplorasi bagaimana model Entman dapat diperkaya dengan analisis konteks sosio-politik untuk memahami lebih dalam motivasi di balik framing media (Nugroho, A., 2023). Penelitian lainnya di tahun 2024 dilakukan oleh Kusuma dan Adiputra dalam buku mereka "Media, Framing, dan Kekuasaan: Perspektif Kritis dalam Kajian Komunikasi Indonesia" memperluas aplikasi model Entman dengan mengintegrasikannya ke dalam analisis kekuasaan dan hegemoni dalam produksi berita. Mereka berargumen bahwa model Entman tidak hanya berguna untuk mengidentifikasi frame, tetapi juga untuk memahami bagaimana frame tersebut mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan dalam masyarakat Indonesia (Kusuma, S., & Adiputra, W. M., 2024). Entman mengidentifikasi empat fungsi utama dari framing:

1. Mendefinisikan masalah
2. Mendiagnosis penyebab
3. Membuat penilaian moral
4. Menyarankan penyelesaian

Framing dalam Jurnalisme Lingkungan

Framing dalam jurnalisme lingkungan memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi publik dan mendorong aksi terhadap isu-isu lingkungan. Framing tidak hanya mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami masalah lingkungan, tetapi juga bagaimana mereka merespons dan bertindak terhadap isu tersebut (Puspita, Y., 2021). Sementara itu, penelitian menjelaskan bahwa peran framing dalam pemberitaan lingkungan semakin kompleks di era media sosial, di mana informasi menyebar dengan cepat dan sering kali tanpa konteks yang memadai (Wijaya, B. S., 2023).

Dalam studi jurnalisme kontemporer, aspek etika juga menjadi tantangan yang tak kalah pentingnya. Bagi jurnalis, pembedaan berita lingkungan seringkali diperhadapkan pada dilema etis seperti keseimbangan obyektifitas dan advokasi. Oleh sebab itu, pembedaan berita lingkungan wajib mempertimbangkan transparansi dari sumber informasi, juga kejelasan saat membedakan antara fakta dan opini (Pratama, D. & Sari, W. P., 2020). Melengkapi hal ini, dalam buku "Jurnalisme Lingkungan di Indonesia" dikemukakan bahwa etika dalam framing berita lingkungan harus mencakup pertimbangan terhadap dampak jangka panjang dari narasi yang dibangun, serta adanya tanggung jawab untuk memberikan ruang suara kepada komunitas yang terdampak langsung oleh isu-isu lingkungan (Astuti, R & Prasetyo, B, 2023).

Obyektifitas dalam Jurnalisme

Objektivitas dalam jurnalisme tetap menjadi konsep yang layak untuk didiskusikan pada setiap studi media di Indonesia. Objektivitas diartikan sebagai upaya jurnalis untuk menyajikan realitas secara berimbang, akurat, dan bebas dari bias personal. Komponen utama objektivitas meliputi keseimbangan dalam penyajian sudut pandang, pemisahan fakta dari opini, dan verifikasi informasi (Ishwara, L., 2020). Sejalan dengan ini, Muhtadi dalam artikelnya menekankan bahwa objektivitas bukan hanya tentang netralitas, tetapi juga mencakup ketelitian, kelengkapan, dan relevansi dalam pelaporan (Muhtadi, A. S., 2021). Bagaimana pun, jurnalis Indonesia masih menganggap objektivitas sebagai ideal yang penting, meskipun implementasinya sering kali terkendala oleh berbagai factor (Prasanti, D., & Indriani, S. S, 2022).

Dalam konteks liputan lingkungan, menjaga objektivitas menghadirkan tantangan unik, dimana kompleksitas isu lingkungan, seperti deforestasi dan perubahan iklim, sering kali dinilai mempersulit upaya untuk menyajikan liputan yang sepenuhnya objektif. Mereka menemukan bahwa jurnalis sering menghadapi dilema antara menjaga netralitas dan mengedepankan urgensi masalah lingkungan (Nugroho, A. C & Sulistyorini, D, 2023). Tantangan tambahan adalah munculnya polarisasi opini publik tentang isu lingkungan, juga tekanan ekonomi media. Objektivitas dalam liputan lingkungan perlu dipahami sebagai proses yang dinamis, yang melibatkan transparansi metode, keragaman sumber, dan kontekstualisasi yang kuat, daripada sekadar keseimbangan mekanis dalam penyajian pandangan yang bertentangan (Fadilah, E. dkk., 2024)

METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme, dengan pendekatan kualitatif. Analisis teks pada artikel dan tayangan menjadi pisau analisis untuk membedah pembingkai media terkait dengan isu deforestasi di Kalimantan Barat. Analisis teks berita dalam penelitian ini bersifat interpretatif dan deduktif pada seluruh berita utuh dari enam media massa yang berbeda. Teks pada lima berita online dan satu (1) tayangan video liputan indepth dari televisi nasional dianalisis menggunakan teknik analisis framing karena teknik ini dapat memahami hubungan atau interkoneksi, perilaku sosial dan dinamika. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah berita:

1. “Babat Alas Kalimantan Bagian 3, Mengungkap Aktor di Balik Mayawana”
<https://pontianakpost.jawapos.com/features/1464689614/babat-alas-kalimantan-bagian-3-mengungkap-aktor-di-balik-mayawana>
2. Babat Alas Kalimantan Bagian 2, Habitat Orang Utan Terusik
<https://pontianakpost.jawapos.com/features/1464686571/babat-alas-kalimantan-bagian-2-habitat-orang-utan-terusik>
3. Melawan Penjagal Hutan Kalimantan”
(<https://www.youtube.com/live/N4nqxQxHu90>)
4. Setelah Ladang dan Hutan Diserobot Mayawana” <https://jaring.id/setelah-ladang-dan-hutan-diserobot-mayawana/>
5. Liputan Khusus Investigasi: “Mayawana Datang Orang Utan Jadi gelandangan”
<https://sorot.betahita.id/news/lipsus/10259/investigasi-mayawana-datang-orangutan-jadi-gelandangan.html?v=1716437966>
6. Loss of farmer life on industrial plantation in Kalimantan’s forest
<https://www.ekuatorial.com/en/2024/05/victims-of-industrial-plantation-forests-in-kalimantan>

7. Was-was Bencana Kala Perusahaan Babat Hutan dan Gambut di Kalbar
<https://www.mongabay.co.id/2024/05/24/was-was-bencana-kala-perusahaan-babat-hutan-dan-gambut-di-kalbar>

Semua hasil liputan berupa laporan indepth investigasi tersebut semuanya terkait dengan isu deforestasi di Kalimantan Barat. Liputan ini adalah sebuah bentuk jurnalisme kolaboratif yang bermanfaat untuk dapat mengungkapkan data dan fakta dari obyek liputan karena kerjasama antar jurnalis yang saling mendukung kerja. Hasil liputan kolaborasi enam media dan menghasilkan tujuh (7) judul berita tersebut juga menjadi liputan yang mempunyai daya sebar lebih banyak dibandingkan dengan liputan tanpa kolaborasi. Berdasarkan alur analisis framing model Entman, maka pendefinisian masalah dilakukan dengan melihat bagaimana sebuah peristiwa muncul dan yang dilakukan oleh penyebab masalah, apakah memberikan manfaat atau memunculkan beragam risiko. Pembingkaiian pada tahap pertama ini menentukan apa (what) peristiwa yang terjadi atau siapa (who) yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Tahapan dalam pengenalan masalah kemudian mengarahkan beragam fakta peristiwa pada sebuah kesimpulan awal tentang penyebab masalah. Selain itu juga menguraikan bagaimana (why) peristiwa tersebut terjadi atau keterlibatan pelaku. Oleh sebab itu, kemudian pembingkaiian selanjutnya berada dalam tahapan melakukan penilaian moral. Analisis Entman dapat melihat bagaimana sebuah teks / narasi dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran seseorang.

Pada proses pembingkaiian terdapat dua kata kunci yaitu *selection* atau pemilihan dan *salience* atau penonjolan. Selection merujuk bagaimana jurnalis baik di lapangan maupun dalam proses menulisannya di redaksi harus memilih di antara fakta peristiwa, termasuk siapa narasumber yang akan diwawancarainya. Sedangkan penonjolan (*salience*) mengarah pada bagaimana aspek yang dipilih tersebut memiliki perhatian lebih.

Tabel 1. Analisis Framing Model Robert M. Entman

Analisis Framing Model Robert M. Entman			
Define Problem (Pendefinisian Masalah)	Diagnose Cause (Diagnose Cause)	Make Moral Judgements (Melakukan Penilaian Moral)	Suggest Remedies (Menyarankan Solusi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah proses pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan mendalam pada artikel media online yang menjadi obyek penelitian dan menyimak rekam audio visual / video dalam liputan panjang CNN Indonesia sebagai-satu-satunya kolaborator dalam media audio visual, maka langkah selanjutnya adalah koding secara kualitatif atas data berupa pokok-pokok artikel atau intisari setiap artikel dan video. Terdapat enam artikel panjang yang dimuat dalam media online, dan sebuah video CNN Indonesia berdurasi 29.05 menit.

Hasil pembacaan naskah. kemudian dikoding mengikuti prinsip koding pada penelitian kualitatif. Berikut adalah lembar koding menggunakan elemen framing Entman.

Tabel 2. Lembar Coding Berdasarkan Elemen Framing Entman

Media	Title /Judul	Define Problem (DP)	Diagnose Cause (DC)	Moral Judgements (MJ)	Suggest Remedies (SR)
Betahita.id	Investigasi: Mayawana Datang, Orangutan	aktivitas penebangan hutan oleh PT Mayawana Persada di	PT Mayawana Persada telah melakukan pembukaan	Tindakan dan pelanggaran PT Mayawana Persada sungguh serius	artikel tidak secara eksplisit menyarankan solusi,namun

	Jadi Gelandangan	Kalimantan Barat berakibat kerusakan habitat orangutan dan ekosistem gambut. Masalah ini digambarkan melalui narasi tentang orangutan yang terpaksa keluar dari habitatnya dan masuk ke kebun warga.	lahan seluas 43,5 ribu hektar sejak 2020, dengan lebih dari setengahnya berada di lahan gambut.	terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan satwa liar. Artikel menekankan pelanggaran terhadap instruksi penghentian aktivitas dari KLHK, dan potensi dampak negatif jangka panjang terhadap ekosistem gambut.	implikasi yang disarankan adalah harapan adanya penegakan hukum yang lebih tegas oleh KLHK, termasuk kemungkinan pencabutan izin PT Mayawana Persada. - Penghentian segera aktivitas penebangan di kawasan lindung dan lahan gambut. - Pelestarian Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di bentang alam Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. - Pemulihan ekosistem gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan banjir. - Peningkatan perlindungan terhadap habitat orangutan dan satwa liar lainnya
Jaring.id	Setelah Ladang dan Hutan Diserobot Mayawana	penyerobotan lahan oleh perusahaan Mayawana Persada yang menyebabkan kesulitan ekonomi dan sosial bagi masyarakat adat Dayak	Penyebab utama masalah ini diidentifikasi sebagai aktivitas perusahaan Mayawana Persada yang telah melakukan pembabatan hutan secara masif untuk kepentingan industri	Artikel memberikan penilaian moral yang negatif terhadap tindakan perusahaan dan implikasi kebijakan pemerintah yang tidak melindungi hak-hak masyarakat adat	implementasi mekanisme kemitraan yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meredam konflik antara masyarakat dan perusahaan
Ekuatorial	Loss of farmer life on industrial plantation in Kalimantan's	Penggusuran paksa dan perampasan lahan petani di Dusun Lelayang oleh PT Mayawana	Aktivitas PT Mayawana Persada ada di atas hutan adat masyarakat,	PT Mayawana Persada bertindak tidak adil dan tidak etis dengan menggusur para	perlunya intervensi pemerintah untuk memastikan perusahaan-

	forest	Persada. Hal ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Akibatnya warga yang terdampak mengalami tekanan ekonomi dan psikologis.	namun justru masyarakat adat mengalami penggusuran dan pembakaran gubuk-gubuk yang diduga kuat dilakukan oleh PT Mayawana.	petani dan menghancurkan properti mereka Perlawanan dan penolakan warga desa untuk menerima tawaran kompensasi dari perusahaan dibingkai sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan secara moral.	perusahaan mematuhi standar hukum dan etika. - Seruan agar PT Mayawana Persada bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan ganti rugi kepada penduduk desa yang terkena dampak tersirat di seluruh narasi.
Mongabay	Was-was Bencana Kala Perusahaan Babat Hutan dan Gambut di Kalbar	deforestasi dan pengeringan lahan gambut oleh PT Mayawana Persada di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Masalah ini dilihat dari berbagai sudut, termasuk dampak lingkungan, sosial, dan kebijakan pemerintah.	PT Mayawana Persada, dengan izin dari Kementerian Kehutanan, melakukan pembabatan hutan dan pengeringan lahan gambut secara agresif.	Aktivitas PT Mayawana Persada dinilai merusak lingkungan dan melanggar komitmen iklim yang telah dibuat oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah tidak konsisten dalam penegakan kebijakan. Dampaknya, masyarakat lokal merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi wilayah mereka.	Mendorong KLHK untuk lebih tegas dalam menegakkan kebijakan dan menghentikan aktivitas ilegal di lahan gambut. Mengusulkan masyarakat lokal untuk tidak takut mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan jika terjadi kerusakan ekologis. Meminta perusahaan dan pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan aktivitas dan kebijakan mereka.
Pontianak Post	Babat Alas Kalimantan Bagian 2, Habitat Orang Utan Terusik	Adanya gangguan habitat orangutan akibat pembukaan hutan rawa gambut oleh perusahaan PT Mayawana Persada. Ini menyebabkan orangutan terpaksa mencari makanan di perkebunan warga, yang menyebabkan konflik antara satwa dan manusia.	Aktivitas pembukaan hutan oleh PT Mayawana Persada yang tidak sesuai dengan peraturan dan perintah KLHK.	simpati terhadap orangutan yang kehilangan habitatnya dan harus mencari makan di daerah yang bukan habitat alaminya.	menyarankan agar pemerintah dan BKSDA segera mengevakuasi orangutan dari perkebunan warga untuk mencegah konflik lebih lanjut. PT Mayawana Persada diminta untuk menghentikan aktivitas

					pembukaan hutan dan fokus pada pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan, penanaman kembali dan rehabilitasi lahan gambut yang telah dirusak oleh aktivitas pembukaan hutan.
Pontianak Post	"Babat Alas Kalimantan Bagian 3, Mengungkap Aktor di Balik Mayawana"	tindakan pembalakan hutan yang masif di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara oleh PT Mayawana Persada, yang dilakukan dengan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	keterkaitan PT Mayawana Persada dengan perusahaan besar lainnya seperti RGE dan perusahaan asing, yang menunjukkan adanya aktor-aktor besar di balik tindakan tersebut.	PT Mayawana Persada dan perusahaan-perusahaan besar yang terlibat. Laporan dari Auriga Nusantara dan Greenpeace Indonesia menyoroti bahwa perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan grup Royal Golden Eagle (RGE), yang memiliki reputasi buruk terkait deforestasi. Meskipun RGE membantah keterlibatan langsung, adanya informasi mengenai kepemilikan saham dari perusahaan yang berbasis di Samoa dan Cayman Island menambah kecurigaan terhadap transparansi dan niat dari perusahaan-perusahaan tersebut.	artikel tersebut mendorong untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tindakan yang lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam deforestasi. Artikel tersebut juga menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti yang diklaim oleh John Morgan dari RGE.

Tabel 3. Lembar Coding framing Entman Video CNN TV Indonesia “Melawan Penjagal Hutan Kalimantan”

Elemen Entman	Keterangan	Time code & Visual
---------------	------------	--------------------

Define Problem (DP)	kerusakan hutan dan intimidasi terhadap masyarakat adat Dayak akibat aktivitas perusahaan PT Mayawana Persada	0:00 - 2:00 Visual deforestasi dan cerita-cerita dari masyarakat adat yang terpaksa menghadapi intimidasi dan kehilangan lahan mereka.
Diagnose Cause (DC)	Penyebab masalah dijelaskan sebagai aktivitas PT Mayawana Persada yang merambah hutan untuk industri. Perusahaan ini memiliki hak konsesi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang luasnya mencapai 136.710 hektar. Kerusakan yang diakibatkan mencapai 33.000 hektar dalam tiga tahun terakhir, yang melebihi deforestasi selama 10 tahun sebelumnya.	2:00 - 10:00 Aktivitas PT Mayawana Persada dan hak konsesi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. -Skala kerusakan hutan dan perbandingan dengan deforestasi sebelumnya. -Penjelasan tentang tanaman monokultur Akasia sebagai bahan baku kertas.
Moral Judgements (MJ)	Evaluasi moral dalam video ini menekankan bahwa tindakan perusahaan tersebut tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga melanggar hak-hak masyarakat adat yang telah tinggal di kawasan tersebut secara turun-temurun. Deforestasi telah menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian mereka, yang berdampak buruk pada kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Selain itu, kerusakan ekosistem juga menyebabkan masalah lingkungan yang lebih luas, termasuk migrasi satwa dan risiko bencana ekologi seperti banjir dan kebakaran.	10:00 - 20:00 Dampak terhadap hak-hak masyarakat adat dan intimidasi yang mereka hadapi. - Pengaruh negatif terhadap sumber mata pencaharian masyarakat adat. - Kerusakan ekosistem dan migrasi satwa. -Risiko bencana ekologi seperti banjir dan kebakaran.
Suggest Remedies (SR)	Solusi yang disarankan mencakup penghentian aktivitas deforestasi oleh perusahaan dan pengembalian lahan kepada masyarakat adat. Video juga menyerukan pemerintah untuk lebih menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta menghentikan pemberian izin konsesi yang merusak lingkungan. Ada juga dorongan untuk keterlibatan lebih besar dari masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.	20:00 - 30:00 Penghentian aktivitas deforestasi oleh perusahaan. -22:00 - 24:00: Pengembalian lahan kepada masyarakat adat. - 24:00-26:00: Dorongan untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat dan penghentian pemberian izin konsesi. - 26:00-28:00: Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. - 28:00 - 30:00: Kesimpulan dan seruan kepada pemerintah serta masyarakat untuk bertindak.

Setelah proses koding tersebut peneliti menandai pada data-data menjadi temuan menarik dan berhubungan dengan titik tekan/ focus penelitian. Peneliti menemukan pola dalam setiap

artikel dari masing-masing media. Pola framing berdasarkan model Entman dikelompokkan kembali sehingga semakin memperlihatkan hasil dan dapat mengidentifikasi apa yang menjadi tekanan dari masing-masing media.

Tabel 4. Tabel Ringkasan Framing Entman Liputan Kolaborasi Enam Media

Define Problem (DP)	Diagnose Cause (DC)	Moral Judgements (MJ)	Suggest Remedies (SR)
Semua artikel secara konsisten menggambarkan deforestasi sebagai masalah besar yang mempengaruhi lingkungan dan komunitas lokal.	Penyebab utama yang diidentifikasi adalah tindakan perusahaan (PT Mayawana) dan kebijakan pemerintah yang memungkinkan deforestasi	Semua artikel menilai tindakan PT Mayawana dan kebijakan pemerintah secara negatif, dengan kritik kuat terhadap dampak sosial dan lingkungan.	Artikel-artikel menawarkan berbagai solusi, mulai dari penegakan hukum yang lebih ketat, perubahan kebijakan, hingga perlindungan habitat dan hak masyarakat lokal.

Dari pola framing Entman terhadap enam media tersebut, maka peneliti mendapatkan beberapa kategori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian. Kategori tersebut adalah:

1. Keberpihakan media
2. Independensi media
3. Ketaatan pada prinsip jurnalisme investigasi
4. Perbedaan penonjolan dan seleksi isu/ fokus framing pada enam (6) media

Keberpihakan Media

Berpijak dari analisis data yang sudah ditempuh, maka peneliti mencatat adanya keberpihakan media yang signifikan dalam pelaporan kolaboratif tentang deforestasi di Kalimantan Barat. Media menunjukkan kecenderungan untuk berpihak pada perlindungan lingkungan, dengan menyoroti praktik-praktik PT Mayawana Persada dan dampak-dampak yang merugikan bagi masyarakat adat dan satwa liar. Kecenderungan ini sejalan dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang diartikulasikan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, yang menekankan tugas jurnalisme untuk kebenaran dan kepentingan publik. Sikap media ini mencerminkan upaya untuk memenuhi peran sebagai pengawas dengan mengekspos penyimpangan perusahaan dan mengadvokasi praktik-praktik berkelanjutan. (Kovach, B & Rosenstiel, T., 2021). Keberpihakan media dalam konteks jurnalisme kolaboratif dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, jurnalisme kolaboratif memungkinkan media untuk bersatu dalam mengungkap kebenaran, mengurangi tekanan dari pihak yang berkepentingan, dan memperkuat suara dalam melaporkan isu-isu penting seperti deforestasi. Namun, keberpihakan media juga bisa muncul dari aliansi dan kepentingan bersama yang mungkin membentuk narasi tertentu, yang berpotensi mengaburkan objektivitas. Telaah teks dan audio visual yang telah dilakukan meunjukkan bahwa pedang bermata dua tersebut tidak berlaku untuk mengaburkan obyektifitas. Tim jurnalis dari masing -masing media massa bekerja menurut prinsip kerja jurnalistik secara etis dan profesional. Jurnalis menjadi sebuah sarana

penyambung realita yang sudah ada di masyarakat, yakni kenyataan adanya deforestasi yang dilakukan oleh PT Mayawana. Kolaborasi media menuntut transparansi dan integritas tinggi dari semua pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa pelaporan tetap adil dan tidak bias. Berdasarkan observasi, penulisan dan penayangan hasil karya jurnalistik enam media tersebut masih mematuhi kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip independensi, yang memungkinkan media untuk tetap kritis terhadap semua pihak yang terlibat dalam isu yang dilaporkan, termasuk perusahaan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.(Garrison, A, 2022)

Independensi Media

Independensi media adalah prinsip dasar jurnalisme yang mengharuskan media untuk melaporkan berita secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal, baik dari pemerintah, korporasi, maupun pihak lain yang berkepentingan. Dalam peliputan deforestasi di Kalimantan Barat oleh PT Mayawana, independensi media diuji ketika berbagai aktor dengan kepentingan berbeda terlibat. Media yang menjaga independensinya cenderung lebih kritis dalam melaporkan isu-isu seperti kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh, Pontianak Post dan Jaring menunjukkan keberanian dalam mengungkapkan izin yang dikeluarkan oleh KLHK dan dampaknya pada masyarakat lokal, mencerminkan komitmen mereka pada kebenaran dan keadilan sosial. Betahita dan Mongabay fokus pada dampak lingkungan menunjukkan bias positif terhadap kelompok konservasi karena afiliasi mereka dengan organisasi lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa media sering kali dipengaruhi oleh pemiliknya dalam peliputan berita, terutama dalam isu-isu yang sensitif dan melibatkan kepentingan ekonomi besar.(McChesney, R. W., 2021) Kebijakan editorial dan target audiens juga memainkan peran penting dalam menentukan fokus framing dalam peliputan. Pontianak Post yang berfokus pada investigasi dan analisis hukum menargetkan pembaca yang peduli pada akuntabilitas pemerintah dan transparansi. Ekuatorial dan Jaring dan CNN TV dengan pendekatan lebih naratif dan sosial menargetkan audiens yang peduli pada hak-hak komunitas adat dan dampak sosial dari deforestasi. Media-media ini menunjukkan bagaimana kebijakan editorial dapat mempengaruhi cara isu dilaporkan dan dipersepsikan oleh publik.(Shoemaker, P. J & Reese, S. D., 2014).

Mengenai independensi, para jurnalis juga telah menerapkan prinsip “independensi harus terjaga baik dari kekuatan eksternal namun juga dari bias diri sendiri”. Hal ini menunjukkan bahwa jurnalis tidak larut terjebak dalam aktivitas penyelamatan lingkungan saja, namun ia tetap sambil terus bekerja melaporkan fakta-fakta yang mungkin tidak menyenangkan bagi perusahaan dan pemerintah. Hal ini tercermin dalam liputan Pontianak Post tentang izin dari KLHK, mereka harus tetap kritis namun objektif, menyajikan perspektif dari berbagai pihak termasuk KLHK, PT Mayawana, dan kritikus kebijakan tersebut. Independensi juga tercermin bagaimana media mengekspos praktik yang merugikan, sehingga jurnalis juga menjalankan perannya sebagai watchdog atau pemantau independen kekuasaan. Prinsip watchdog lebih dari sekadar memantau pemerintah. Namun juga memantau semua lembaga kuat dalam masyarakat. Dalam melaporkan kasus PT Mayawana, jurnalis harus memastikan bahwa berbagai suara didengar. Ini termasuk suara masyarakat adat, aktivis lingkungan, perwakilan perusahaan, dan pejabat pemerintah.

Ketaatan Jurnalis pada Prinsip Jurnalisme Investigasi

Peran jurnalis dalam framing isu deforestasi oleh PT Mayawana Persada, adalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam karya mereka "The Elements of Journalism". Kovach dan Rosenstiel telah menetapkan beberapa prinsip fundamental jurnalisme yang sangat relevan dengan kasus ini yaitu: Kewajiban pertama jurnalisme

adalah pada kebenaran. Pada bagian ini, Kovach dan Rosenstiel (2021) menekankan bahwa "Tujuan jurnalisme adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan agar orang bisa bebas dan mengatur diri sendiri." Dalam konteks kasus PT Mayawana, ini para jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menggali dan melaporkan fakta-fakta sebenarnya tentang dampak deforestasi, terlepas dari tekanan dari kepentingan korporasi atau politik. Contohnya, ketika Mongabay melaporkan kekhawatiran akan bencana akibat pembabatan hutan dan gambut, mereka tidak hanya menyampaikan opini, tetapi juga harus didukung oleh data dan analisis ilmiah yang kuat. Seperti yang dinyatakan Kovach dan Rosenstiel, "Kebenaran jurnalistik adalah proses yang dimulai dengan disiplin profesional dalam mengumpulkan dan memverifikasi fakta. Prinsip kerja peliputan yang dilakukan oleh para jurnalis kolaborasi liputan ini juga menjunjung tinggi prinsip "loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga". Prinsip ini sangat relevan dalam kasus PT Mayawana. Kovach dan Rosenstiel berpendapat bahwa jurnalis harus memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, framing yang berpihak pada perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi loyalitas ini. Misalnya, ketika Jaring.id fokus pada dampak sosial dan perampasan lahan yang dihadapi masyarakat lokal, mereka menunjukkan komitmen pada prinsip ini.

Bagian penting dalam prinsip berikutnya yang ditunjukkan oleh para jurnalis yakni mereka disiplin melakukan verifikasi, sebagai esensi dari jurnalisme. Dalam melaporkan isu kompleks seperti deforestasi, verifikasi menjadi sangat penting. Para jurnalis liputan kolaborasi ini bekerja dengan disiplin verifikasi. Verifikasi ini lantas menjadi pembeda jurnalisme dari bentuk komunikasi lain seperti propaganda, fiksi, atau hiburan. Jurnalis telah melakukan verifikasi, seperti ketika Betahita melaporkan dampak terhadap habitat orangutan, mereka harus memverifikasi informasi ini dengan ahli konservasi, data ilmiah, dan jika memungkinkan, observasi langsung.

Berikut adalah salah satu contoh kutipan yang menunjukkan adanya disiplin verifikasi. Contoh diambil dari artikel Mongabay yang menunjukkan daftar narasumber dengan komprehensif.

"Kalau seperti ini, menunjukkan kalau PT MP sebenarnya melakukan penebangan di area konservasi tinggi dan berpotensi merusak komitmen iklim pemerintah," ucap Direktur Satya Bumi, Andi Muttaqien saat berdiskusi dengan tim kolaborasi.

Sedangkan narasumber lainnya adalah:

1. Andi Muttaqien, Direktur Satya Bumi - Berbicara mengenai potensi kerusakan komitmen iklim pemerintah akibat aktivitas PT Mayawana Persada (Mayawana).
2. Risno Murti Candra, Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha pada Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Menyatakan bahwa kegiatan Mayawana sudah sesuai dengan rencana yang disetujui.
3. Samsidar, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Banjar Lestari - Mengomentari pengalaman kebakaran hutan dan kekhawatiran dampak aktivitas Mayawana terhadap hutan desa mereka.
4. Nyoman Suryadiputra, ahli lahan basah - Memberikan pandangan tentang dampak pengeringan lahan gambut dan risiko kebakaran.
5. Mustafa, Ketua LPHD Hutan Bersama dari Desa Nipah Kuning - Mengkritik kurangnya komunikasi antara Mayawana dan warga desa terkait aktivitas perusahaan.
6. Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa Indonesia - Menyoroti risiko degradasi hutan desa dan kemungkinan pencabutan izin hutan desa akibat aktivitas perusahaan.

Jurnalis juga menggunakan narasumber warga lokal yang dilindungi identitas dan tidak

dituliskan namanya sebagai warga terdampak dan yang mengetahui seluk beluk hutan. Deretan narasumber ini memberikan berbagai perspektif mengenai aktivitas pembukaan lahan oleh PT Mayawana Persada dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Inilah yang dinamakan sebagai bagian dari disiplin verifikasi untuk menunjukkan kerja jurnalistik yang berkualitas.

Praktik jurnalisme kolaborasi enam media ini jelas menggunakan model framing, namun secara nyata, para peliputnya melakukan kerja jurnalistik sesuai dengan prinsip jurnalisme investigasi yang mendasar antara lain adalah mengungkapkan kejahatan publik, memperjuangkan kepentingan umum, menjaga akurasi, dan melakukan pelaporan yang mendalam dan mendetail.

Dalam prinsip mengungkapkan kejahatan publik, ditunjukkan dengan artikel "Babat Alas Kalimantan Bagian 3, Mengungkap Aktor di Balik Mayawana" yang berfokus pada mengungkap identitas dan tindakan dari aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan deforestasi ilegal. Dalam artikel ini, jurnalis berhasil mengidentifikasi individu atau organisasi yang bertanggung jawab, serta menjelaskan mekanisme yang digunakan untuk menutupi kegiatan mereka. Selanjutnya adalah prinsip memperjuangkan kepentingan bersama, yang dibuktikan dalam artikel "Setelah Ladang dan Hutan Diserobot Mayawana" dari Jaring.id. Kerja jurnalis nampak dalam mendokumentasikan dampak deforestasi pada masyarakat lokal, termasuk kehilangan ladang dan hutan yang mereka andalkan untuk hidup. Artikel ini memperjuangkan kepentingan bersama dengan menyuarakan penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh komunitas lokal.

Sebuah liputan investigasi, tidak mungkin meninggalkan akurasi dan pelaporan mendalam, sehingga dalam menghasilkan karya jurnalistiknya, jurnalis melakukan penelitian yang intensif untuk memastikan akurasi informasi yang disampaikan, termasuk wawancara dengan ahli dan masyarakat lokal. Artikel "Babat Alas Kalimantan Bagian 2, Habitat Orang Utan Terusik" dari Pontianak Post dan "Mayawana Datang Orang Utan Jadi Gelandangan" dari Betahita menunjukkan pelaporan yang mendalam dengan data yang rinci mengenai dampak deforestasi terhadap habitat orangutan. Demikian pula dengan liputan dari CNN Indonesia yang menunjukkan dengan detail mengenai gambaran keseharian masyarakat adat terdampak.

Liputan indepth dari CNN Indonesia juga bersifat mengungkap dan membedah. Secara visual edisi berjudul ""Melawan Penjagal Hutan Kalimantan" mengungkap dan membedah operasi deforestasi ilegal, memberikan bukti visual yang kuat mengenai tindakan ilegal tersebut. Dokumentasi visual ini memperkuat narasi investigatif dan membantu audiens memahami secara langsung skala dan dampak dari deforestasi yang dilakukan oleh PT Mayawana.

Keragaman perspektif, juga menjadi kekuatan dari liputan kolaborasi ini dan berpihak kepada kebenaran fakta, buah dari disiplin verifikasi. Hal ini dapat dibaca dalam artikel "Loss of farmer life on industrial plantation in Kalimantan's forest" dari Ekuatorial, yang menyoroti bagaimana kehidupan petani terdampak oleh industri perkebunan besar. Dengan menghadirkan perspektif petani lokal, artikel ini menambahkan lapisan kedalaman dalam pelaporan dan memperkaya pemahaman pembaca tentang dampak sosial dan ekonomi dari deforestasi.

Sebagai praktik jurnalisme lingkungan, maka para jurnalis konsisten bekerja dengan menghadirkan dampak ekologis dan sosial. Pada artikel "Was-was Bencana Kala Perusahaan Babat Hutan dan Gambut di Kalbar" dari Mongabay.co.id mengulas dampak ekologis dari deforestasi, seperti potensi bencana alam akibat rusaknya ekosistem hutan dan gambut. Artikel ini juga menyampaikan kekhawatiran masyarakat lokal terhadap dampak tersebut, memperkuat prinsip memperjuangkan kepentingan bersama dengan memaparkan dampak negatif yang luas dari tindakan PT Mayawana.

Perbedaan Penonjolan dan Seleksi Isu pada Enam (6) Media

1. Fokus pada Komunitas Adat dan Dampak Sosial:

Artikel dari Jaring dan Ekuatorial juga liputan panjang dari video CNN Indonesia, menonjolkan dampak sosial dan komunitas adat yang terdampak oleh deforestasi yang dilakukan oleh PT Mayawana. Jaring menggambarkan bagaimana masyarakat lokal kehilangan ladang dan hutan mereka, sehingga menyoroti aspek hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ekuatorial memperluas diskusi dengan memasukkan korban-korban dari perkebunan industri di Kalimantan, menunjukkan perhatian yang lebih luas terhadap dampak sosial dari kebijakan pemerintah dan tindakan perusahaan. Fokus pada komunitas adat dan dampak sosial ini bisa dipengaruhi oleh kebijakan editorial yang berkomitmen pada isu-isu keadilan sosial dan lingkungan, serta audiens target yang peduli pada hak-hak masyarakat lokal dan dampak sosial dari pembangunan.

2. Fokus pada Aspek Hukum dan Kebijakan:

Pontianak Post (Bagian 3) dan Mongabay lebih menekankan pada aspek hukum dan kebijakan yang memungkinkan deforestasi terjadi. Pontianak Post mengkritik izin yang dikeluarkan oleh KLHK yang memungkinkan PT Mayawana melakukan pembalakan hutan secara masif. Mongabay menyoroti perusahaan-perusahaan besar yang melanggar hukum lingkungan dan mengusulkan moratorium pembabatan hutan serta restorasi lahan gambut. Kedua artikel ini menunjukkan perhatian pada kebijakan pemerintah dan pelanggaran hukum, yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan editorial yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta audiens yang memiliki kepentingan dalam kebijakan lingkungan dan hukum.

3. Fokus pada Dampak Lingkungan dan Habitat Hewan

Artikel dari Betahita dan Pontianak Post (Bagian 2) memberikan perhatian khusus pada dampak lingkungan, terutama pada habitat hewan seperti orangutan. Betahita menyoroti bagaimana ekspansi perusahaan menyebabkan orangutan kehilangan tempat tinggal mereka, sementara Pontianak Post menggambarkan gangguan terhadap ekosistem dan spesies yang dilindungi. Fokus pada dampak lingkungan dan habitat hewan ini menjadi kebijakan editorial yang berfokus pada konservasi alam dan perlindungan spesies. Audiens target yang peduli pada isu-isu lingkungan dan konservasi juga menjadi faktor pendorong dalam framing ini.

4. Perbedaan dalam gaya penulisan dan ciri khas media:

Setiap media memiliki gaya penulisan dan ciri khas yang mempengaruhi framing mereka. Pontianak Post dan CNN Indonesia TV, menggunakan pendekatan *feature* yang mendalam (*indepth reporting*) menyajikan narasi yang kaya akan detail dan wawancara. Mongabay dan Ekuatorial cenderung menggunakan pendekatan investigatif, dengan fokus pada data dan analisis yang mendalam mengenai kebijakan dan dampaknya. Jaring dan Betahita menggunakan pendekatan yang lebih naratif, menggambarkan kisah-kisah individu yang terdampak oleh deforestasi. Perbedaan ini mencerminkan kebijakan editorial dan target audiens masing-masing media, serta afiliasi pendukung. Media yang memiliki afiliasi dengan organisasi lingkungan atau yang berkomitmen pada jurnalistik investigatif dipastikan lebih fokus pada data dan analisis kebijakan, sementara media yang berfokus pada isu-isu sosial dan komunitas lebih memilih pendekatan naratif.

KESIMPULAN

Pola framing yang ditemukan menunjukkan kecenderungan media untuk berpihak pada pelestarian lingkungan termasuk satwa liar dan hak-hak masyarakat lokal. Media menyoroti kesalahan perusahaan dan kebijakan pemerintah, serta menawarkan solusi yang mendukung perlindungan lingkungan dan komunitas. Variasi dalam framing terlihat dalam penekanan pada aspek yang berbeda (sosial, lingkungan, kebijakan), tetapi secara umum, semua media menunjukkan keberpihakan pada pelestarian lingkungan dalam hal ini hutan di Kalimantan Barat lengkap dengan ekosistemnya, dan keadilan sosial. Jurnalis juga bekerja secara independen, meskipun didukung dengan jejaring organisasi pro lingkungan dan hutan, namun keberimbangan narasumber dan disiplin verifikasi menjadi bukti independensi.

Semua artikel dan video secara konsisten menggambarkan deforestasi sebagai masalah besar yang mempengaruhi lingkungan dan komunitas lokal. Penyebab utama yang diidentifikasi adalah tindakan perusahaan (PT Mayawana) dan kebijakan pemerintah yang memungkinkan deforestasi. Semua artikel dan video menilai tindakan PT Mayawana dan kebijakan pemerintah secara negatif, dengan kritik kuat terhadap dampak sosial dan lingkungan. Artikel-artikel dan video menawarkan berbagai solusi, mulai dari penegakan hukum yang lebih ketat, perubahan kebijakan, hingga perlindungan habitat dan hak masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, karya jurnalistik yang dibuat juga memenuhi prinsip-prinsip utama jurnalisme lingkungan dengan teknik investigasi yaitu mengungkap kejahatan publik, dimana semua artikel fokus pada mengekspos tindakan deforestasi ilegal oleh PT Mayawana dan aktor-aktor di baliknya. Karya jurnalistik juga memaparkan perjuangan kepentingan umum, menyuarakan penderitaan masyarakat lokal dan dampak ekologis yang luas, menyoroti pentingnya isu ini untuk kepentingan bersama. Proses kerja untuk pelaporan mendalam memegang prinsip akurasi yang dihimpun melalui disiplin verifikasi, wawancara, data yang rinci, juga bukti visual.

Mengingat pentingnya framing dalam membentuk persepsi publik, penelitian dapat dilanjutkan dengan penelitian komparatif antara berbagai jenis media (media cetak, online, televisi, dan media sosial) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana setiap platform membingkai isu lingkungan. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi bagaimana perbedaan dalam framing tersebut mempengaruhi tindakan dan sikap publik terhadap deforestasi. Selain itu juga dapat dikembangkan penelitian framing media mempengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan publik yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, R., & Prasetyo, B. (2023). *Jurnalisme Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Penerbit Kompas.
- Chong, D., & Druckman, J. N. (2021). *Dynamic Framing Effects: Annual Review of Political Science* (24 ed.).
- Eriyanto. (2020). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS.
- Fadilah, E., Yulianto, M., & Haryanto, I. (2024). *Jurnalisme Lingkungan di Era Digital: Tantangan dan Strategi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Garrison, A. (2022). *Collaborative Journalism: Bridging the Gap Between Investigative Reporting and Audience Engagement*. 37(2), 123-137.
- Greenpeace Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Deforestasi Indonesia 2022*. Greenpeace Indonesia.
- Guo, L., & McCombs, M. (2020). *Network Agenda Setting and Beyond: A Review of Theoretical*

- and Methodological Advances. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, (Vol. 4).
- Hanitzsch, T. (2011). Populist Disseminators, Detached Watchdogs, and Critical Change Agents." 61(6), 124-140.
- Ishwara, L. (2020). *Etika Jurnalisme: Prinsip-Prinsip Dasar*. Penerbit Buku Kompas.
- kalbarprov.go.id. (2024, Februari 27). <https://kalbarprov.go.id/berita/pemprov-kalbar-sambut-positif-implementasi-multi-usaha-perhutanan-sosial-bagi-masyarakat/>
- Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2021). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. Crown Publishing Group.
- Kusuma, S., & Adiputra, W. M. (2024). *Media, Framing, dan Kekuasaan: Perspektif Kritis dalam Kajian Komunikasi Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lecheler, Boomgaarden, H., & S. Matthes, J. (2020). Setting the Agenda for Research on Media and Migration: State-of-the-Art and Directions for Future Research. *Journalism* (Vol. 10).
- Matthes, J. (2021). Framing Effects: Theory and Evidence from 25 Years of Research. *Journal of Communication* (Vol. 5).
- McChesney, R. W. (2021). *Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy*. The New Press.
- Muhtadi, A. S. (2021). Memahami Ulang Konsep Objektivitas dalam Jurnalisme Indonesia. 10(1), 23-38.
- Nugroho, A. (2023). Integrasi Model Framing Entman dan Analisis Wacana Kritis: Sebuah Pendekatan Baru dalam Studi Media Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 21(1), 45–62.
- Nugroho, A. C., & Sulistyorini, D. (2023). Dilema Objektivitas dalam Liputan Lingkungan: Studi Kasus Jurnalis Indonesia. 6(2), 145-162.
- Pickard, V. (2022). *Democracy Without Journalism? Confronting the Misinformation Society*. Oxford University Press.
- Prasanti, D., & Indriani, S. S. (2022). Persepsi Jurnalis Indonesia terhadap Objektivitas: Antara Idealisme dan Realitas. 7(1), 178-195.
- Pratama, D., & Sari, W. P. (2020). *Etika Media di Era Digital: Studi Kasus Jurnalisme Lingkungan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Puspita, Y. (2021). Analisis Framing Berita Lingkungan di Media Online Indonesia. *Jurnal Komunikasi Lingkungan*. 5(2), 112-128.
- Rulli Nasrullah. (2020). *Metode Penelitian Jurnalisme Pendekatan Kualitatif* (1 ed.).
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective*.
- Vos, T. P., & H., F. (2021). *Gatekeeping in Transition*. Routledge.
- Walter, N, Cohen, J, & Moeller, J. (2024). The Role of Social Media Algorithms in Framing Effects: A Computational Approach. *New Media & Society*,. 26(1), 140-159.
- Wijaya, B. S. (2023). Dinamika Framing Isu Lingkungan di Media Sosial: Studi Kasus Gerakan #SaveIndonesianForests. 7(1), 78–95.
- Wijaya, Juliane, R., & A., Samadhi, T. N.,. (2022). Deforestation Declined for the Fifth Straight Year in Indonesia. World Resources Institute Indonesia.
- WWF Indonesia. (2024). Laporan Dampak Deforestasi terhadap Keanekaragaman Hayati di Kalimantan Barat. WWF Indonesia.